

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang

Berdasarkan Peta Wilayah Kota Malang dapat dikemukakan bahwa batas wilayah Kota Malang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kec. Karangploso dan Kec. Singosari, sebelah timur berbatasan dengan Kec. Pakis dan Kec. Tumpang, sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji dan sebelah barat berbatasan dengan Kec. Wagir dan Kec. Dau dengan letak kondisi Kota Malang yang demikian maka Kota Malang merupakan daerah yang strategis hubungannya dengan peningkatan Pendidikan dan Perekonomian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dnas Pendidikan Kota Malang, bahwa Kota Malang terdiri dari 1 Kota dan terdiri 5 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 57 kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 110.06 km².

Tabel 4.1

Administrasi Pemerintahan Kota Malang atau Propinsi Jawa Timur Tahun 2012

No.	Variabel	Jumlah
1.	Kota	1
2.	Kecamatan	5
3.	Kelurahan	57
4.	Desa tertinggal	0
5.	Luas wilayah	110.06 Km ²

Sumber: Narasi Profil Pendidikan Kota Malang 2011-2012

Jumlah penduduk di kota Malang 833.419 orang. Dari jumlah tersebut 75.107 berusia 7-12 tahun (9,01 persen), 38.239 berusia 13-15 tahun (4,58 persen) dan 44.554 berusia 16-18 tahun (5,34 persen). Berdasarkan data tahun 2011/2012 penduduk kota Malang ini bertambah 0,80 persen per tahun dengan jumlah kelahiran sebesar 1.271 (0,04 persen) dan angka kematian 361 (0,15 persen). Angka migrasi ke luar diperkirakan sebesar 2.370 orang per tahun dan migrasi ke dalam sebesar 24.887 orang per tahun. Menurut catatan terakhir pada tahun 2011 kepadatan penduduk adalah 7.572 per km² dengan kecamatan Blimbing sebagai kecamatan terpadat (19.830 per km²) dan kecamatan Kedungkandang sebagai kecamatan terjarang (4.444 per km²).

Tabel 4.2
Keadaan Demografi Kota Malang Tahun 2012

No	Komponen	Jumlah	No	Komponen	Jumlah
1.	Penduduk seluruh	833.419	2.	Penduduk 13—15 th	38.239
3.	Penduduk 7—12 th	75.107	4.	Penduduk 16—18 th	44.554
5.	Tingkat pendidikan penduduk		6.	Tingkat kependaian membaca	
	a. Tidak/belum tamat SD	176.768		a. Dapat membaca menulis	690.719
	b. Tamat SD	198.103		b. Buta huruf	17.153
	c. Tamat SMP	151.432	7.	Angkatan Kerja	
	d. Tamat SMA	175.184		a. Bekerja	392.706
	e. Tamat SMK	73.590		b. Mencari pekerjaan	4.361
	f. Tamat Diploma I/II	3.917	8.	Bukan Angkatan kerja	
	g. Tamat Diploma III/Sarmud	5.417		a. Bersekolah	202.807
	h. Tamat Sarjana	24.502		b. Mengurus RT	249.824
				c. Lainnya	31.606
			9.	Penduduk Miskin	7.113
				Daerah Kota	7.113

Sumber: Narasi Profil Pendidikan Kota Malang 2011-2012

2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Malang

a. Profil Dinas Pendidikan Kota Malang

Dinas Pendidikan Kota Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang di bidang pendidikan maka Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksana pendidikan yang meliputi urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan antara lain perencanaan, penyelenggaraan, pelayanan, pembinaan dan pemeliharaan sarana pendidikan.

b. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Malang

1. Visi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, Dinas Pendidikan Kota Malang telah menetapkan visinya, yaitu: *“Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Pemerataan Akses Pendidikan Untuk Mewujudkan Insan Yang Cerdas, Berakhlak, Profesional dan Berbudaya”*.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan mempunyai misi sesuai mandat yang diterima sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kualitas, kuantitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Mewujudkan Manajemen dan Pelayanan Pendidikan yang bermutu.

c. Tujuan dan Sasaran

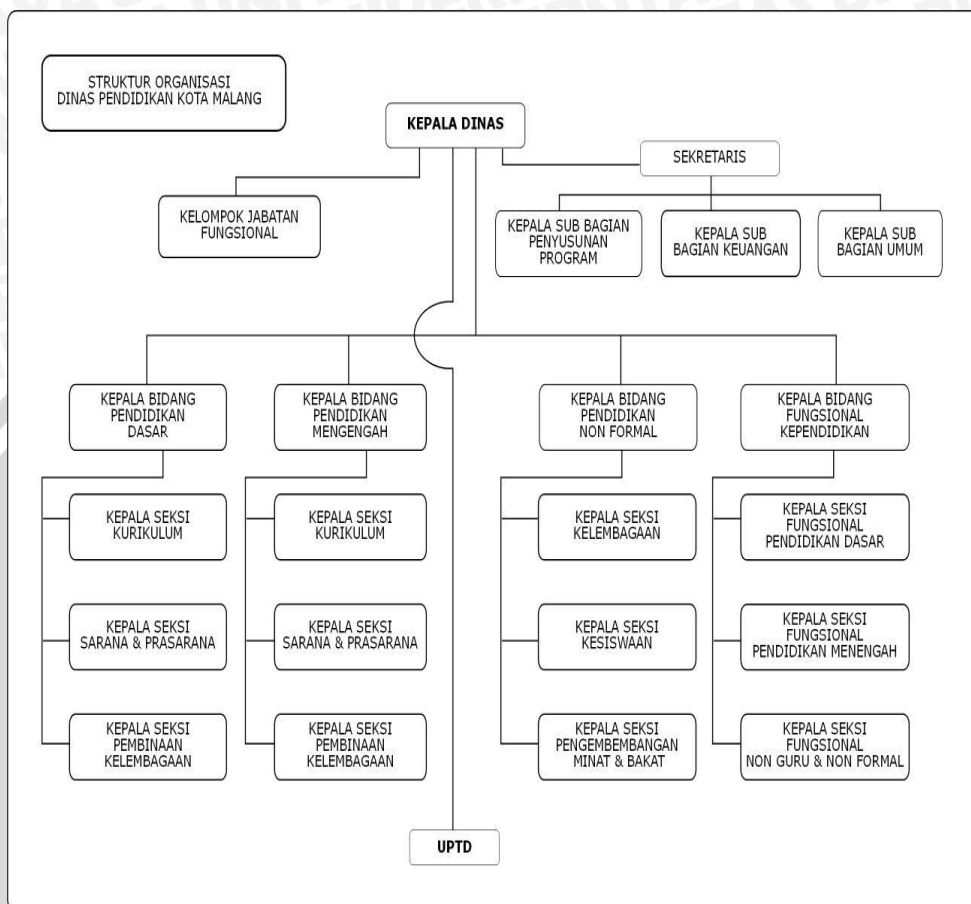
Penjabaran lebih lanjut sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Malang dilakukan dengan merealisasikan beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik yang dimaksud adalah guru dan pengawas sebagai kelompok struktural yang melaksanakan kebijakan dan tenaga kependidikan yang dimaksud adalah aparatur Dinas Pendidikan sebagai kelompok fungsional yang membuat kebijakan.
- b. Meningkatkan Mutu Manajemen dan Pelayanan Pendidikan.

Adapun Sasaran pada tahun 2012 yang akan dicapai dari tujuan-tujuan di atas, meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1.
- b. Meningkatnya Mutu Manajemen dan Pelayanan Pendidikan.
- c. Pemerataan Akses Pendidikan.
- d. Meningkatnya Pendidikan Luar Sekolah.

d. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang



Bagan 4.1
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang

A. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana

- c. Seksi Pembinaan Kelembagaan
4. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelaksanaan Kurikulum
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan
5. Bidang Pendidikan Nonformal, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan
 - b. Seksi Kesiswaan
 - c. Seksi Pengembangan Minat dan bakat
6. Bidang Fungsional Kependidikan, terdiri dari:
 - a. Seksi Fungsional Pendidikan Dasar
 - b. Seksi Fungsional Pendidikan Menengah
 - c. Seksi Fungsional Non Guru dan Non Formal
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Malang

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Malang sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Nomor Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang adalah:

a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian, monitoring, evaluasi program, serta statistik dan pelaporan program pengembangan pendidikan, administrasi kepegawaian, organisasi ketatalaksanaan, rumah tangga Dinas serta urusan umum lainnya.
2. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pendidikan dasar dan pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, pendidikan menengah umum dan kejuruan serta ketenagaan
3. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pendidikan
4. Sosialisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal
6. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal

7. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan nonformal
8. Pengawasan pelaksanaan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal
9. Pembinaan dan usulan penempatan tenaga fungsional kependidikan
10. Pelaksanaan pemberian izin dan pencabutannya serta pelayanan umum dibidang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah umum dan kejuruan, ketenagaan sesuai kewenangannya berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Walikota
11. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pendidikan
12. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi
13. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan
14. Pelaksanaan penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan non formal
15. Pelaksanaan fasilitasi akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi kompetensi tenaga fungsional kependidikan yang profesional
16. Sosialisasi dan pelaksanaan uji kompetensi siswa, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional
17. Pengkoordinasian, fasilitasi, monitoing dan evaluasi pelaksanaan ujian
18. Pelaksanaan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan
19. Pelaksanaan dan pengawasan kerjasama bidang pendidikan
20. Pelaksanaan dan pembinaan olah raga dan kesenian

21. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
22. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
23. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
24. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan
25. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah
26. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan
27. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional
28. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
29. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pendidikan memerlukan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan tersedianya SDM yang handal dan berkualitas maka tugas pelayanan pendidikan di lingkungan Kota Malang dapat dilayani secara prima dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Serta mampu menyediakan tenaga kependidikan yang handal dan

sarana prasarana pembelajaran guna mempertahankan mutu pendidikan di Kota Malang. Dalam mewujudkan hal tersebut upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan.

Sumber daya manusia (SDM) yang diuayakan bukan hanya pada kelompok struktural saja namun juga pada kelompok fungsional. Kelompok struktural yang dimaksud adalah aparatur yang ada pada Dinas Pendidikan dan Tata Usaha (TU) ada masing-masing sekolah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan membuat kebijakan yang sesuai untuk pendidikan di Kota Malang. Maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Sedangkan ada kelompok fungsional yang dimaksud adalah tenaga pendidik atau guru dan pengawas sekolah, dimana mereka yang berhubungan langsung dengan siswa didik. Maka diperlukan sumber daya manusia yang baik pula agar terjadi proses pendidikan yang baik.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Malang sesuai dengan Renstra

a. Kebijakan,

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang bahwa kebijakan yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang pada setiap tahunnya berbeda.

“.. Kami selaku dinas, memang sudah selayaknya mengeluarkan kebijakan dalam hal meningkatkan mutu. Alasannya banyak, karena dalam menjalani suatu program, memang wajib didahului adanya sebuah kebijakan..” (wawancara bersama Ibu Zubaidah pada tanggal 17 Desember 2012 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Hal ini disesuaikan dengan kondisi pendidikan yang selalu berubah juga pada setiap periode. Namun dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2013 dalam peningkatan mutu pendidikan lebih ditekankan atau difokuskan pada peningkatan tenaga pendidik. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang antara lain:

- 1) Memberikan beasiswa kepada pegawai dan guru untuk melanjutkan sekolah S1

Yaitu membiayai sekolah guru yang masih menyanggah gelar diploma untuk melanjutkan ke jenjang S1 atau D IV sehingga mencapai guru yang berkualifikasi minimal S1. Dengan kualitas guru yang sudah S1 diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan terampil sehingga dapat memaksimalkan pendidikan yang diberikan pada siswa. Karena hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Zubaidah bahwa

“...Dinas Pendidikan Kota Malang berasumsi jika kualitas guru sudah ditingkatkan menjadi S1 maka hasil yang dicapai akan lebih maksimal jika dibandingkan dengan yang berpendidikan SMA atau diploma, yaitu siswa yang mendapat pendidikan akan mencapai hasil yang lebih baik dan lebih terampil melalui guru yang pendidikannya lebih tinggi...” (wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2012 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Untuk pelaksanaan program beasiswa S1 dan S2 ini melalui seleksi. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Trisna selaku kepala bidang fungsional Dinas Pendidikan Kota Malang bahwa seleksi tersebut dilakukan secara independen, yaitu diberikan sesuai bidang studi yang diprogramkan oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Malang atas perintah dari Pemerintah Daerah berwenang untuk menyeleksi siapa saja tenaga pendidik yang akan mendapatkan beasiswa S1 dan S2. Untuk beasiswa S2 persyaratan yang harus dipenuhi adalah harus sudah S1

dan mengikuti seleksi yang dilakukan secara independen tersebut.

Persyaratan ini juga berlaku untuk beasiswa S1.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Zubaidah yang menyampaikan bahwa

“... jumlah pegawai yang mendapat beasiswa pada tahun 2010 untuk beasiswa S1 adalah 40 orang. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu untuk beasiswa S1 PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) ada 40 guru dan untuk beasiswa S2 ada 30 orang. Kemudian pada tahun 2012 jumlah guru yang mendapat beasiswa untuk S1 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) ada 30 guru dan beasiswa S2 untuk guru menengah atas ada 20 guru...” (wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2012 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Peningkatan kualitas guru dan pegawai melalui kebijakan beasiswa S1 dan S2 tersebut dinilai akan meningkatkan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Trisnawati bahwa pada umumnya guru dan pegawai yang telah mendapatkan beasiswa tersebut wajib untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang.

Beliau juga mengatakan bahwa

“... pada tahun 2012 saat ini dengan adanya kebijakan tersebut prestasi Dinas Pendidikan Kota Malang mengalami peningkatan, baik dari prestasi guru atau tenaga pendidik maupun prestasi siswa yang mendapatkan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa prestasi yang didapatkan, antara lain pemenang lomba-lomba kreativitas guru baik guru maupun kepala sekolah, mendapatkan prestasi baik untuk pengawas di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Selain itu prestasi untuk siswa dalam olimpiade yang diikuti oleh

siswa mampu bersaing sampai ke tingkat luar negeri...” (Wawancara dengan Ibu Trisnawati selaku kepala bidang fungsional Dinas Pendidikan Kota Malang, pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Bapak Kepala Sekolah SDN Penanggungan juag menyampaikan mengenai pelaksanaan program beasiswa tersebut.

Beliau menyampaikan bahwa

“... Dinas Pendidikan Kota Malang memberikan beasiswa untuk guru yang sudah S1 untuk menempuh S2 yang saat ini terdapat sekitar ± 30 orang guru yang sedang menempuhnya...” (wawancara dengan Bapak Sudiyono selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungan Kota Malang)

Prestasi yang dicapai seperti diatas tidak begitu saja berjalan dengan baik, namun ada hambatan dalam pelaksanaannya. Ibu Trisnawati menjelaskan bahwa

“... adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, antara lain masih ada beberapa guru yang tidak dapat menyelesaikan program S1 sesuai dengan tingkat yang telah ditentukan sehingga mereka wajib melanjutkan atau menyelesaikannya dengan menggunakan biaya sendiri yaitu tidak lagi mendapatkan beasiswa dari pemerintah...” (Wawancara dengan Ibu Trisnawati selaku kepala bidang fungsional Dinas Pendidikan Kota Malang, pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Dinas Pendidikan membuat target pada tahun 2014 nanti semua guru harus sudah S1. Sesuai dengan kondisi guru saat ini yang masih ada beberapa guru yang masih belum berkualifikasi S1 maka ditargetkan pada tahun 2014 nanti semua guru sudah menyangang S1. Target yang dibuat telah dilaksanakan dan

diupayakan dengan baik, hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Ibu Trisnawati yang mengatakan bahwa

“...Sampai saat ini program beasiswa S1 yang sudah dan sedang terlaksana berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan hasil yang diinginkan, yaitu seluruh guru yang disekolahkan ke jenjang S1 sampai saat ini sebagian besar berhasil lulus...” (wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Keberhasilan program beasiswa S1 tidak hanya disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Malang, akan tetapi sekolah yang ada di Kota Malang juga menyampaikan hal yang sesuai. Salah satunya adalah sekolah SDN Penanggungan. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Penanggungan, beliau mengatakan bahwa

“... kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dengan adanya beasiswa tersebut karena guru atau tenaga pengajar menjadi lebih memiliki kompetensi pada bidangnya sehingga dapat lebih maksimal dalam memberikan ilmu pengetahuan...” (wawancara dengan Bapak Sudiyono selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungan Kota Malang)

Data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut

Tabel. 4.4

Jumlah guru yang berkualifikasi S1 Tahun 2011

No .	Pendidikan	Sekolah Negeri	Madrasah Negeri	Sekolah Swasta	Madrasah Swasta	Jumlah
1.	S1 Pendidikan	4299	232	2944	735	8210
2.	S1 lain	414	5	543	89	1051
3.	S2/S3	166	81	103	18	368
Total						9629

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2011

Tabel. 4.5

Jumlah guru yang berkualifikasi S1 Tahun 2012

No .	Pendidikan	Sekolah Negeri	Madrasah Negeri	Sekolah Swasta	Madrasah Swasta	Jumlah
1.	S1 Pendidikan	4551	175	3033	780	8539
2.	S1 lain	375	29	645	138	1574
3.	S2/S3	295	114	175	33	617
Total						10730

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2012

Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2012 terjadi peningkatan jumlah guru atau tenaga pendidik yang sudah berkualifikasi S1. Dilihat dari jumlah keseluruhan pada tahun 2010 jumlah total guru yang berkualifikasi S1 mencapai 8.787 guru, mengalami peningkatan sebanyak 842 pada tahun 2011 yaitu menjadi 9.629 kemudian pada tahun 2012 juga meningkat lagi sebanyak 1.101 yaitu menjadi 10.730 guru yang

sudah berkualifikasi S1. Kesimpulannya adalah selalu terjadi peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi S1 pada setiap tahunnya, hal ini berarti bahwa kebijakan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pendidikan tercapai dengan baik.

2) Mengadakan Workshop untuk melatih keterampilan guru

Workshop merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat dalam bentuk sosialisasi. Dalam workshop tidak hanya melakukan sosialisasi, akan tetapi di dalamnya juga ada diskusi untuk pemecahan masalah pendidikan yang sedang dihadapi. Workshop ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu workshop ini ditujukan tidak hanya pada guru yang mengajar saja tapi juga tenaga kependidikan yaitu pegawai yang ada di Dinas Pendidikan dan kelompok pengawas dan UPT di sekolah.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Trisnawati yaitu

“... dalam mengadakan workshop untuk guru di Kota Malang dana diperoleh dari APBD Kota Malang. Tujuan dari diadakannya workshop adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kinerja. Workshop ini ditujukan tidak hanya kepada tenaga pendidik yaitu guru namun juga ditujukan pada tenaga kependidikan yaitu tenaga yang ikut berpartisipasi dalam pendidikan selain guru. Tenaga pendidik pun diklasifikasikan antara guru dan kepala sekolah...” (wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Setiap workshop yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang selalu berjalan dengan baik dan hasilnya juga sudah cukup baik. Ibu Zubaidah menyimpulkan bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaan workshop-workshop selama ini, beliau menyampaikan

“... dalam satu tahun atau dalam setiap tahunnya hanya diadakan beberapa kali saja, tidak dalam setiap bulan. Sehingga untuk peserta workshop diwajibkan untuk hadir atau harus diprioritaskan untuk mengikuti workshop. Yang mana kemudina hasil yang didapat dari workshop yang diikuti akan disampaikan dalam Musawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP ...” (wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2012 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Salah satu workshop yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang adalah workshop PTK atau Penelitian Tindakan Kelas. Bapak kepala sekolah SDN Penanggungan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaannya, yaitu

“...dalam workshop PTK ini bertujuan untuk melihat langsung bagaimana proses belajar mengajar di kelas. Workshop dilaksanahn dengan cara memberikan materi kepada guru, kemudian mereka dikumpulkan di lapangan untuk mensimulasikan kegiatan mereka seperti saat berada di kelas, yang kemudian mereka dikumpulkan lagi di dalam ruangan untuk mempresentasikan apa yang mereka lakukan. Disini maka akan didapatkan penjelasan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh guru di kelas, yang kemudian akan dilakukan pelatihan lagi seperti sebelumnya untuk mendapatkan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Disini Dinas Pendidikan akan dapat secara langsung mengamati kegiatan guru dan tahu dengan sendirinya dimana kesulitan yang dihadapi...” (wawancara dengan Bapak Sudiyono selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungan Kota Malang)

Namun terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan workshop yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang, seperti yang disampaikan oleh ibu Trisnawati bahwa

“... beberapa kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan workshop ini antara lain adalah pesertanya tidak bisa menjangkau semua guru di setiap jenjang, maka solusi yang kami lakukan adalah dilaksanakan workshop secara bertahap sesuai dengan jenjang, misalnya workshop untuk guru SMA, SMP dan SD dibedakan...” (wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Akan tetapi hal seperti yang disampaikan Ibu Trisnawati diatas tidak menjadi masalah atau hambatan bagi Dinas Pendidikan Kota Malang. Karena menurut pihak penerima kebijakan yaitu bapak kepala sekolah SDN Penanggungungan hal itu justru memberi kemudahan dalam pelaksanaan workshop. Beliau menyampaikan bahwa

“... dengan adanya klasifikasi dalam peserta workshop yang dilaksanakan akan lebih mempermudah pelaksanaan workshop. Kemudahannya antara lain peserta tidak terlalu banyak karena peserta sudah diklasifikasikan sesuai jenjangnya. Disamping itu dalam pelaksanaan workshop akan lebih fokus dengan apa yang di diskusikan di dalamnya, misalnya jika peserta workshop adalah guru jenjang SMP maka akan lebih fokus dalam membahas mata pelajaran di lingkup pendidikan menengah...” (wawancara dengan Bapak Sudiyono selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungungan Kota Malang)

Berikut ini adalah data yang kami peroleh dari hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Malang mengenai jumlah

peserta workshop yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tahun 2011 dan tahun 2012.

Tabel 4.6
Data workshop yang diadakan pada tahun 2011

No.	Nama workshop	Jumlah yang hadir
1.	Pelantikan angka kredit guru	Jumlah total
2.	Pelatihan karya ilmiah, PTK, dan lomba-lomba	240 orang
3.	Bimbingan teknis pembelajaran inovasi dan lomba-lomba	

Sumber: data diolah peneliti

Tabel 4.7
Data workshop yang diadakan pada tahun 2012

No.	Nama workshop	Jumlah yang hadir
1.	Peningkatan kompetensi guru untuk menjadi guru profesional	100 orang
2.	Bimbingan teknis induksi bagi guru CPNS	150 orang
3.	Pelatihan penghitungan kenaikan pangkat guru melalui angka kredit	280 orang
4.	Penyusunan bahan ajar berbasis ICT dan lomba	100 orang
5.	Penulisan karya ilmiah, PTK, dan lomba	250 orang
6.	Bimbingan teknis penyusunan bahan ajar Olahraga	100 orang
7.	Bimbingan teknis pembelajaran inovasi	240 orang

Sumber: data diolah peneliti

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan workshop oleh Dinas Pendidikan Kota Malang berjalan dengan baik. Terbukti dengan meningkatnya jumlah peserta workshop dari tahun 2011 ke tahun 2012. Disini dapat dilihat adanya kerjasama yang baik antara pihak pelaksana dan peserta workshop, pelaksana workshop yaitu Dinas Pendidikan Kota Malang selalu meningkatkan kinerjanya untuk tujuan tercapainya kualitas tenaga pendidik yang lebih baik yang salah satu upaya nya adalah melaksanakan workshop untuk tenaga pendidik.

3) Melaksanakan KKG dan MGMP

Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan Kota Malang yaitu dibentuknya KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). KKG dan MGMP tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru. KKG diberlakukan untuk pendidikan dasar yaitu pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak) dan SD (Sekolah Dasar) sedangkan MGMP untuk pendidikan menengah yaitu pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Kebijakan diatas merupakan salah satu kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang, dimana dalam

meningkatkan mutu pendidikan tersebut dikelompokkan dalam dua kategori yaitu yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri dan yang kedua adalah meningkatkan mutu tenaga pendidik. KKG dan MGMP ini berkaitan dengan workshop yang juga menjadi salah satu kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Malang, dimana hasil yang telah didiskusikan dalam workshop diatas akan disampaikan hasilnya dalam setiap rapat KKG dan MGMP.

Pada saat ini peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik yaitu guru dan tenaga kependidikan yaitu aparatur Dinas Pendidikan itu sendiri. Meanggapi hal tersebut ibu Zubaidah menyampaikan bahwa

“... jika dilihat dari ijazahnya, karyawan atau guru yang rata-rata diploma atau SMA memiliki kinerja yang lebih rendah atau masih dibawah karyawan atau guru yang sudah berkualifikasi S1 atau D IV. Beliau berpendapat bahwa jika tenaga pendidiknya atau guru sudah cerdas maka siswa akan ikut cerdas juga. Dengan melihat ijazah dari beberapa tenaga pendidik di Kota Malang yang masih belum S1 maka diharapkan pada tahun 2014 nanti sudah tidak ada lagi, karena semua pegawai harus sudah memiliki ijazah minimal S1...” (wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2012 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa KKG dan MGMP ini dapat menunjang tingkat profesionalisme tenaga pendidik. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui program ini juga dirasakan oleh sekolah yang dibawah oleh

Dinas Pendidikan Kota Malang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudyono selaku kepala SD Penanggungungan Kota Malang yaitu

“...KKG sangat menunjang kinerja tenaga pendidik baik guru maupun non guru dalam meningkatkan profesionalisme kerjanya. Karena dalam rapat KKG seluruh peserta diberikan kewenangan untuk menyampaikan keluhan mereka dalam mengajar yaitu pada kesulitan mata pelajaran yang diampu. Maka dengan adanya komunikasi langsung dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Malang akan lebih mempermudah dalam mendapatkan solusi, disamping itu pihak Dinas Pendidikan Kota Malang juga dapat secara langsung mendengarkan keluhan dalam mengajar secara langsung dan detail...” (wawancara dengan Bapak Sudyono selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungungan Kota Malang)

Dari penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan diatas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Pendidikan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan Kota Malang melalui peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilaksanakan dengan baik. Pihak pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan sendiri dapat merealisasikan kebijakannya secara nyata. Untuk kebijakan beasiswa ke jenjang S1 dapat dilaksanakan dengan baik dan terjadi peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi S1 pada setiap tahunnya. Untuk workshop juga dapat dilihat peserta workshop juga meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012. Jadi kesimpulannya Dinas Pendidikan Kota Malang berhasil melaksanakan kebijakannya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Kota Malang melalui peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.

b. Program dan kegiatan

Beberapa program dan kegiatan merupakan bentuk realisasi dari kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dalam peningkatan mutu pendidikan Kota Malang. Sesuai dengan data lampiran yang diperoleh dari Penjabaran Perubahan APBD tahun 2012 dari Dinas Pendidikan Kota Malang terdapat beberapa program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Dimana setiap program yang dibuat diwajibkan untuk dilaksanakan. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

1) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Sertifikasi pendidikan merupakan salah satu upaya meningkatkan kinerja tenaga pendidik dengan melakukan sertifikasi. Sertifikasi pendidik ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang khususnya Bidang Fungsional Kependidikan. Ibu Trisnawati menyampaikan bahwa

“...tujuan dilaksanakan sertifikasi pendidik ini antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan kualifikasi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan sertifikasi.”

(Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Kegiatan sertifikasi pendidik tersebut dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember pada setiap

tahunnya. Dan tempat dilaksanakannya di SMA Negeri 09 Malang dan di Dinas Pendidikan. Untuk pelaksanaan program ini hasilnya sampai sekarang baik. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan bahwa

“... program sertifikasi tenaga pendidik ini memiliki dampak positif bagi tenaga pendidika yang ada di Kota Malang, salah satunya adalah mendorong minat mereka untuk lebih berkompeten dalam hal mendidik siswa...” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Hal tersebut juga seperti yang disamaikan oleh bapak Kepala Sekolah SDN Penanggungan yang mengatakan bahwa

“...dengan dilaksanakannya sertifikasi tenaga pendidik terbukti memberikan semangat lebih untuk guru untuk lebih meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Guru yang ada di sekolah ini semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi bagi tenaga pendidik tersebut...” (wawancara dengan Bapak Sudiyo selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungan Kota Malang)

Tabel 4.8

Data jumlah tenaga pendidik yang lulus sertifikasi tahun 2011 dan tahun 2012

Tahun	Jumlah yang lulus sertifikasi
2011	1019 orang
2012	845 orang

Sumber: data diolah peneliti

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kelulusan sertifikasi tenaga pendidik mengalami peningkatan pada tahun

2011 akan tetapi jumlah tersebut menurun pada tahun 2012. Sertifikasi tenaga pendidik ini menjadi jembatan untuk guru yang lebih sejahtera dengan adanya tunjangan dari sertifikasi tersebut. Maka program sertifikasi pendidik ini masih perlu ditingkatkan.

b. Seleksi Calon Kepala Sekolah

Seleksi calon kepala sekolah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang khususnya bidang Fungsional Kependidikan dalam rangka pembinaan untuk calon kepala sekolah.

“... tujuan dengan adanya seleksi calon kepala sekolah adalah memeberikan arahan yang jelas dalam pembinaan kemampuan professional guru agar dapat mewujudkan keterbukaan tata cara dalam seleksi guru yang diberi tugas tambahan untuk menjadi kepala sekolah...” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Selain itu Ibu Trisnawati juga menyampaikan bahwa

“... seleksi calon kepala sekolah ini dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Oktober dan tempat pelaksanaannya adalah d SMA Negeri 04 Malang ... Dan sampai saat ini pelaksanaan Seleksi calon kepala sekolah ini berjalan dengan baik dan hasil yang dicapai pun baik, terbukti dengan tidak adanya masalah-masalah atau keluhan sejak dilaksanakannya program ini, justru menjadikan kepemimpinan seorang kepala sekolah menjadi lebih baik dan lebih tanggung jawab...” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Tabel 4.9*Rincian program dalam seleksi calon kepala sekolah*

1.	Materi yang diberikan	a. Psikotes oleh tim seleksi b. Presentasi karya ilmiah c. Tes tulis dan wawancara
2.	Kriteria calon kepala sekolah	a. Diutamakan yang pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah b. Diutamakan guru yang sudah senior c. Memiliki dedikasi yang tinggi d. Direkomendasi oleh sekolah nya
3.	Tes yang dilakukan untuk seleksi	a. Uji kompetensi b. Uji wawasan atau ilmu pengetahuan
4.	Soal wawancara	a. Riwayat hidup b. Riwayat pendidikan c. Riwayat pekerjaan d. Konsep pendidikan e. Visi dan misi
5.	Jumlah yang ikut seleksi	100 orang

Sumber: data diolah penulis

Seleksi calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang mendapat tanggapan positif oleh pihak sekolah yang ada di Kota Malang. Terbukti dengan adanya antusiasme calon kepala sekolah untuk mengikuti seleksi. Dalam hal ini seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dirinci dengan adanya seleksi tulis dan tes wawancara, disamping itu juga diberikan materi sebagai panduan menjadi kepala sekolah. Seleksi diatas berhasil dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang

dalam menilai calon kepala sekolah yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

c. Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Non PNS

Bantuan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS ini merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dimana bantuan tersebut berupa dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Malang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru non PNS. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Trisnawati bahwa

“... bantuan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi tenaga pendidikan atau guru non PNS agar terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional...”

Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa

“...yang melaksanakan program tersebut adalah Dinas Pendidikan Kota Malang khususnya bidang fungsional pendidikan dimana dana yang didapatkan tersebut telah dianggarkan melalui APBD Kota Malang...”

“...dalam pelaksanaannya anggaran yang diperoleh dari APBD melalui Dinas Pendidikan dana akan di transfer ke rekening masing-masing orang yang berhak memperoleh melalui Bank BNI yang ada di Kota Malang...”

(Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Program ini dilaksanakan di awal tahun anggaran yang akan diajukan tiap bulan kepada keuangan Pemerintah Kota. Untuk pencapaiannya sampai saat ini dirasa sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Trisnawati bahwa

“... selama ini dirasa capaiannya sudah baik karena program ini terlaksana dengan baik sesuai prosedur dan mendapat tanggapan positif dari tenaga pendidik non PNS yang menerimanya, meskipun nilai anggarannya belum bisa memenuhi nilai UMR (Upah Minimum Regional) yang ada Kota Malang saat ini....” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Pendapat diatas juga sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak kepala sekolah SDN Penanggungan yang memberikan tanggapan positif atas program tersebut, beliau mengatakan bahwa

“...program bantuan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS memberikan dampak yang cukup baik bahkan sangat baik karena dengan adanya bantuan semacam itu akan lebih memotivasi guru-guru yang belum menjadi PNS untuk lebih giat dan semangat untuk melakukan pekerjaannya sebagai guru...” (wawancara dengan Bapak Sudiyono selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungan Kota Malang)

Tabel 4.10

Alokasi dana bantuan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS

No.	Penggolongan penerima bantuan	Sumber bantuan	Jumlah penerima	Besarnya bantuan

1.	Sesuai kriteria yang ditentukan oleh masing-masing sumber	a. Bosda madin	8.359 orang	Rp 300.000 Per bulan
		b. APBD	3.226 orang	Rp 200.000 Per bulan
		c. APBN	140 orang	Rp 300.000 Per bulan
		d. Muslimat NU prof jatim	100 orang	Rp 150.000 Per bulan

Sumber: data diolah peneliti

Dengan adanya bantuan kesejahteraan untuk tenaga pendidik non PNS memberikan dampak yang positif bagi penerima bantuan yaitu tenaga pendidik non PNS yang ada di Kota Malang. Bantuan seperti diatas juga berpengaruh pada kinerja guru non PNS, yang mana dengan diberikan tunjangan untuk mereka maka akan menambah semangat untuk lebih meningkatkan kinerjanya walaupun status mereka adalah guru non PNS. Program bantuan kesejahteraan ini terlaksana dengan baik, terbukti dengan kelancaran pelaksanaan program dengan baik sampai saat ini.

- d. Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

Dinas Pendidikan Kota Malang juga menyelenggarakan lomba bagi tenaga pendidik di Kota Malang. Lomba ini tidak hanya disediakan untuk guru, akan tetapi juga lomba kepala sekolah dan lomba pengawas berprestasi. Lomba seperti ini

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang khususnya bidang fungsional pendidikan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Trisnawati yang menyampaikan

“...tujuan dari diadakannya lomba guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi adalah untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang harapannya nanti akan berpengaruh positif pada peningkatan kinerja dan profesionalisme serta memberikan penghargaan terhadap prestasi tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi tidak hanya pada guru saja kami berikan lomba yang memotivasi ini, akan tetapi juga pada kepala sekolah dan pengawas, agar seluruh tenaga pendidik yang ada di Kota Malang lebih termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya..” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Bapak Kepala Sekolah SDN Penanggungan menanggapi terlaksananya beberapa program untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang, beliau menyampaikan:

“... beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang terkait peningkatan mutu pendidikan antara lain dengan diadakannya lomba. Lomba yang diadakan dibedakan menjadi dua yaitu untuk siswa dan tenaga pengajar. Yang pertama adalah untuk siswa, yaitu dengan mengadakan berbagai lomba yaitu lomba melukis, lomba puisi, olimpiade bina kreatifitas siswa, lomba seni, lomba keagamaan dan lomba karya ilmiah. Beberapa lomba yang diadakan tersebut untuk mendukung keterampilan siswa, jadi siswa tidak hanya memiliki kemampuan ada mata pelajaran saja namun juga dapat mengembangkan bakatnya. Selanjutnya adalah untuk guru atau tenaga pendidik, hampir sama dengan siswa yaitu diadakan beberapa lomba, antara lain: lomba paduan suara,

lomba kreatifitas guru, dan porseni guru. Kegiatan seperti ini tidak hanya diberlakukan pada guru yang mengajar di sekolah, namun juga diberlakukan pada komite sekolah...” (wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungan Kota Malang)

Kegiatan lomba ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 2 - 4 Maret dan 12 April 2012 dan tanggal 22 – 25 Mei 2012 yang bertempat di SMA Negeri 04 Malang. Hasil dari diadakannya lomba semacam ini dirasakan baik oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Bapak Sudyono selaku kepala sekolah SDN Penanggungan Kota Malang juga menyampaikan bahwa

“...upaya dari Dinas Pendidikan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang antara lain adalah dengan mengadakan lomba untuk guru berprestasi. Lomba ini tidak hanya untuk guru pengajar saja, akan tetapi juga ada lomba kepala sekolah dan pengawas berprestasi. Lomba yang diadakan antara lain lomba kreatifitas guru, lomba untuk karya ilmiah dan lomba paduan suara. Lomba seperti ini berdampak positif bagi tenaga pendidik di sekolah kami, antara lain guru menjadi lebih kreatif dan dapat menyalurkan kemampuannya diluar mata pelajaran yang disampaikan atau diajarkan. Jadi tidak hanya siswa yang diadakan lomba tapi juga tenaga pendidiknya. Hasilnya sampai saat ini positif, terbukti dengan peserta lomba yang terus meningkat dan para peserta yang telah mengikuti lomba juga lebih semangat dalam mengajar dan juga mendukung program dari Dinas Pendidikan Kota Malang yang seperti ini...” (wawancara dengan Bapak Sudyono selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungan Kota Malang)

Tabel 4.11

Tabel pelaksanaan lomba guru, kepala sekolah

dan pengawas berprestasi tahun 2012

No.	Jenis lomba	Waktu	Tempat	Pelaksana
1.	a. Lomba guru 1. Guru berprestasi dan berdedikasi PLB 2. Karya ilmiah 3. Paduan suara 4. Porseni guru	2 - 4 Maret dan 12 April 2012	SMA Negeri 04 Malang.	Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang
	b. Lomba kepala sekolah 1. Lomba kepala sekolah berprestasi	22 - 25 Mei 2012		
	c. Lomba pengawas berprestasi Diikuti oleh 5 orang pengawas sekolah di Kota Malang	22 - 25 Mei 2012		

Sumber: data diolah penulis

Data diatas menunjukkan bahwa setiap lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dilaksanakan secara terjadwal dan serempak. Lomba yang diadakan juga sesuai dengan kebutuhan misalnya ada lomba karya ilmiah yang mana lomba seperti ini akan meningkatkan kemampuan guru untuk mendapatkan wawasan umum yang lebih.

e. Peningkatan Kualifikasi dari S1 Ke S2 Bagi Tenaga Pendidik

Program peningkatan kualifikasi dari S1 ke S2 bagi pendidik diberikan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pendidik yang lebih baik. Karena sesuai dengan hasil

wawancara bahwa pada dasarnya peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang difokuskan pada peningkatan tenaga pendidiknya terlebih dahulu. Ibu Zubaidah menyampaikan bahwa

“...kebijakan dari Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang pada dasarnya adalah berfokus pada peningkatan tenaga pendidiknya. Karena kami berasumsi bahwa jika tenaga pendidik sudah memiliki kualifikasi yang baik (sudah sama rata memiliki ijazah S1) maka nantinya akan berpengaruh pada proses belajar mengajar yang terjadi, sehingga dampaknya nanti adalah siswa didik juga akan lebih berkualitas karena tenaga pendidiknya juga telah meningkatkan kualitasnya melalui pendidikan sampai S1 atau bahkan S2...” (wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2012 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Tujuan dari dilaksanakn kualifikasi pendidikan sampai ke jenjang S1 dan S2 adalah untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2012, dimana universitas yang ikut bekerjasama adalah Universitas Negeri Malang. Ibu Trisnawati menyampaikan bahwa

“... Universitas Negeri Malang ditunjuk sebagai universitas yang mampu menciptakan tenaga pendidik yang baik dan berkualitas salah satunya karena adanya program kependidikan, yang mana memang lulusan dari Universitas Negeri Malang ini dilahirkan untuk menjadi tenaga pendidik. Hasil dari pendidikan ini adalah baik, terbukti bahwa mereka yang sudah lulus dapat mengaplikasikan pengetahuannya dengan baik di sekolah.” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Tenaga pendidik yang dimaksud adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan siswa dalam proses belajar mengajar yaitu guru, kepala sekolah dan pengawas di sekolah yang secara langsung menghadapi siswa. Berikut tabel yang diperoleh penulis tentang jumlah tenaga pendidik yang sudah berkualifikasi S2

Tabel 4.12
Peningkatan jumlah guru berkualifikasi S2 2011 dan 2012

No.	Tahun	Jumlah guru berpendidikan S2
1.	2011	365 orang
2.	2012	387 orang

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2011 dan 2012

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi S2 pada tahun 2011 dan 2012. Artinya Dinas Pendidikan Kota Malang berhasil melaksanakan programnya untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik bukan hanya pada jenjang S1 saja akan tetapi sampai ke jenjang S2.

f. Rapat Kerja Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK

Rapat kerja untuk kepala sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK se-Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang khususnya bidang fungsional pendidikan. Tujuan diadakannya rapat kerja ini adalah meningkatkan kualitas kepala sekolah dimana kepala sekolah

menjadi pusat kebijakan dalam setiap proses belajar mengajar di sekolah. Menanggapi hal tersebut Ibu Trisnawati menyampaikan bahwa

“...tujuan dari diadakannya rapat kerja kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK adalah untuk menciptakan kepala sekolah yang handal dan berkompeten yaitu kepala sekolah yang memiliki kompetensi dalam hal kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Dengan peningkatan kompetensi-kompetensi tersebut akan berdampak juga peningkatan proses belajar mengajar di setiap sekolah melalui kebijakan dari seorang kepala sekolah yang berkompeten dan profesional...” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Menanggapi hal tersebut kepala Sekolah SDN Penanggungungan menyebutkan beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan

“... beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pendidikan melalui pemberdayaan kepala sekolah yaitu melalui rapat kerja kepala sekolah. Kegiatan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut, pada tingkat sekolah dasar rapat kerja melalui K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) sedangkan pada tingkat sekolah menengah yaitu SMP dan SMA melalui MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). Dalam pelaksanaannya K3S dilaksanakan pada setiap kecamatan yaitu dengan mengumpulkan kepala sekolah di setiap kecamatan, sedangkan MKKS dilaksanakan dalam satu kota. Hal ini dikarenakan jumlah SD sangat banyak dan ada di setiap desa, sedangkan sekolah menengah yaitu SMP dan SMA jumlahnya hanya beberapa dan banyak terletak di kota. (wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungungan Kota Malang)

Rapat kerja kepala sekolah ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 2012 di Hotel Victory Kota Malang. Hasil dari program ini menurut Ibu Trisnawati adalah baik. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa

“... hasil atau keluaran dari rapat kerja kepala sekolah ini dapat dikatakan baik, karena dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar yaitu seluruh kepala sekolah mengikuti rapat ini. Hasilnya pun ketika dalam rapat mereka mengikuti dengan baik. Dan mereka mengaplikasikan dengan baik apa yang didapat dari rapat ini dalam kehidupan sekolah sehari-hari...” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Capaian yang cukup baik ini juga disampaikan oleh kepala sekolah SDN Penanggungan Kota Malang yaitu

“...dengan adanya kelompok kerja kepala sekolah seperti ini memberikan dampak positif bagi saya selaku kepala sekolah. Dengan program seperti ini memberikan perhatian pada kepala sekolah untuk dapat berperan sebagai kepala sekolah dengan lebih baik. Melalui rapat ini juga saya lebih memiliki wawasan mengenai kewajiban sebagai seorang kepala sekolah yang baik dalam membina sekolah...” (wawancara dengan Bapak Sudiyono selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungan Kota Malang)

Tabel 4.13

Pelaksanaan rapat kerja kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2012

1.	Pelaksana	Dinas Pendidikan Kota Malang khususnya Bidang Fungsional Pendidikan
2.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 4 sampai 5 Agustus 2012

3.	Tempat pelaksanaan	Hotel Victory Kota Malang
4.	Jumlah kepala sekolah yang ikut	Total dari kepala seekolah TK, SD, SMP dan SMA adalah 150 orang kepala sekolah

Sumber: data diolah penulis

Rapat kerja kepala sekolah yang dilaksanakan diatas sampai saat ini dapat dikatkan berhasil. Karena antusiasme kepala sekolah untuk mengikuti rapat kerja sangat tinggi. Dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Penanggungban bahwa adanya rapat kerja seperti ini dapat dijadikan fasilitas kepala sekolah untuk berinovasi dalam memimpin setiap sekolah yang dikepalai. Selain itu para kepala sekolah dalam rapat kerja dapat saling melengkapi dalam bekerjasama untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk sekoah yang lebih baik.

g. Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif

Bimbingan teknis dan lomba dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang khususnya bidang fungsional pendidikan. Tujuan dari diadakannya bimbingan teknis dan lomba media pembelajaran yang inovatif ini terutama untuk memacu siswa dan guru untuk dapat berinovasi dan berprestasi. Ibu Trisnawati menjelaskan mengenai bimbingan ini yaitu

“...bimbingan teknis dan lomba dalam media pembelajaran yang inovatif dibentuk dengan tujuan untuk memacu siswa dan guru untuk lebih berinovasi dan berprestasi dalam kegiatan belajar. Disini mereka berlomba untuk dapat mengembangkan kemampuan kreatifitas dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik. Dengan diadakannya lomba dan bimbingan seperti ini maka guru dan siswa mendapat tempat untuk dimana mereka mengembangkan kemampuannya dalam menciptakan inovasi baru dalam suasana belajar. Selama ini hasil yang dicapai cukup baik, guru dan siswa yang ada di Kota Malang juga mengikuti proses kegiatan dengan baik dan penuh tanggapan positif...” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Tabel 4.14

Pelaksanaan bimbingan teknis dan lomba media pembelajaran yang inovatif

1.	Pelaksana	Bidang Fungsional Dinas Pendidikan Kota Malang
2.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 2 sampai 5 April 2012
3.	Tempat pelaksanaan	SMA Negeri 1 Malang
4.	Jumlah peserta bimbingan	
	a. Bimbingan teknis	240 peserta
	b. Media pembelajaran yang inovatif	10 besar dari peserta bimbingan teknis

Sumber: data diolah penulis

Dari data diatas kita ketahui bahwa siswa tidak hanya mendapat pelajaran berupa mata pelajaran saja. Dalam bimbingan teknis diatas siswa juga dibimbing untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam proses kegiatan belajar sehari-

hari. Dengan fasilitas seperti ini dapat membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuannya dengan mengaplikasikan teknologi dan mata pelajaran untuk dapat dijadikan solusi yang inovatif untuk kegiatan belajar yang lebih baik.

h. Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba

Pelatihan guru dalam penulisan karya ilmiah, penelitian tindakan kelas dan lomba dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang khususnya bidang fungsional kependidikan. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Trisnawati adalah

“...pelatihan guru dalam penulisan karya ilmiah, penelitian tindakan kelas dan lomba ini bertujuan untuk mendukung terlatihnya SDM (Sumber Daya Manusia) guru dalam pembuatan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas guna meningkatkan mutu kinerja agar lebih baik dan produktif...” (Wawancara dengan ibu Trisnawati selaku Kepala Bidang Fungsional Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 28 Januari 2013 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Tabel 4.15

Jumlah peserta penulisan karya ilmiah, penelitian tindakan kelas dan lomba

1.	Pelaksana	Bidang Fungsional Dinas Pendidikan Kota Malang
2.	Waktu pelaksanaan	Tanggal 26 sampai 29 Maret 2012
3.	Tempat pelaksanaan	Di SMA Negeri 09 Malang
4.	Jumlah peserta	Total : 250 guru

Pelatihan guru penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas

Sumber: data diolah penulis

Pelatihan seperti ini bersifat membimbing dan melatih tidak hanya secara teori tapi juga praktek. Agar guru memiliki bekal dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas, disamping itu juga meningkatkan kinerja guru untuk lebih produktif yaitu tidak hanya semata-mata mengajar di kelas saja.

Dari uraian program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang seperti diatas dapat disimpulkan bahwa program dapat dilaksanakan dengan baik. Program-program nya pun bervariasi sesuai kebutuhan pendidikan yang ada di Kota Malang, dimana Kota Malang yang sudah menjadi Kota Pendidikan terus meningkatkan kualitas pendidikannya salah satunya melalui pemanfaatan teknologi. Dinas Pendidikan sangat mendukung dan memfasilitasi hal tersebut terbukti dengan adanya bimbingan teknis dan medi pmebelajaran yang inovatif. Disamping itu untuk tenaga pendidik atau guru juga difasilitasi antara lain dengan adanya bantuan kesejahteraan bagi guru non PNS dan adanya lomba-lomba salah satunya lomba karya ilmiah.

c. Anggaran

Sesuai dari data lampiran yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Malang, berikut ini adalah anggaran dari dana APBD yang dialokasikan untuk pendidikan di Kota Malang tahun 2011-2012:

- 1) Anggaran Pendidikan seluruh (Dinas Pendidikan dan UPTD)
Rp 147.450.448.000
- 2) Anggaran TK (PAUD Formal)
Rp 57.500.000
- 3) Anggaran Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rp 33.179.597.376
- 4) Anggaran Pendidikan Menengah
Rp 45.638.019.424
- 5) Anggaran Pendidikan Non Formal
Rp 5.430.673.500
- 6) Anggaran Kesetaraan (Paket A, B, dan C)
Rp 750.000.000

Anggaran dana diatas adalah anggaran yang berasal dari APBD Kota Malang. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa

“... anggaran dari APBD Kota Malang sudah memiliki alokasi dana untuk pendidikan yaitu 10% dari jumlah APBD Kota Malang dianggarkan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang. Dimana dari 10% tersebut yang 60% dianggarkan untuk peningkatan mutu pendidikan secara fisik yaitu untuk rehabilitasi fasilitas, sarana dan prasarana sekolah di Kota Malang, sedangkan 40% nya dianggarkan untuk peningkatan mutu pendidikan Kota Malang bidang non fisik nya yaitu untuk program-program yang dibuat dan dilaksanakan...” (wawancara dengan Ibu Zubaidah

selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 17 Desember 2012 di Dinas Pendidikan Kota Malang)

Dalam prakteknya anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang untuk pencapaian mutu pendidikan yang baik tidak hanya didapatkan dari APBD Kota Malang saja namun juga dari pihak lain. Melalui wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Penanggungungan bahwa kegiatan dan program yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang ini didukung dengan finansial yang memadai. Beliau menyampaikan

“...anggaran yang didapatkan bukan hanya dari dana APBD saja. Seperti program KKG (Kelompok Kerja Guru) yang mendapat bantuan baik melalui APBD maupun dari pusat. Di Kecamatan Klojen juga mendapatkan bantuan dana dari Surabaya yaitu LPMD (Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan) yang mana lembaga tersebut memberi bantuan berupa dana dan materi untuk pelatihan dan workshop yang dilakukan...” (wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungungan pada tanggal 18 Desember 2012 di SDN Penanggungungan Kota Malang)

Kesimpulannya adalah alokasi dana untuk pendidikan di Kota Malang yaitu sebesar 10% dari jumlah APBD Kota Malang dianggarkan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang. Dimana dari 10% tersebut yang 60% dianggarkan untuk peningkatan mutu pendidikan secara fisik sedangkan 40% nya dianggarkan untuk peningkatan mutu pendidikan Kota Malang bidang non fisik. Kemudian untuk beberapa kegiatan juga mendapatkan bantuan dana dari lembaga lain misalnya LPMD yang ada di Surabaya memberikan bantuan dana untuk kegiatan workshop yang diadakan di Kota Malang.

2. Kinerja Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Malang

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014 mneuliskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang dapat dilihat dari peningkatan mutu tenaga kependidikan. Capaian kinerja dari indikator kinerja sesuai dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik) dan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pendidikan Kota Malang dapat diukur tingkat ketercapaiannya melalui Tabel Penilaian Skala Ordinal yang bersumber dari LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang.

Tabel 4.19
Tabel Penilaian Skala Ordinal

Nilai %	Pencapaian
90 – 100	Tercapai
80 – 90	Cukup tercapai
60 - 80	Kurang Tercapai
Kurang dari 60	Tidak Tercapai

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2011 dan 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja dapat dikatakan tercapai jika sudah mencapai angka 80%. Maka sesuai dengan data resmi yang diperoleh penulis dari Dinas Pendidikan Kota Malang yaitu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dapat dilihat capaian kinerja pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.17
Capaian mutu pendidikan Kota Malang tahun 2011

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Guru/Murid			
SD/MI	6	5	83,33% / Cukup Tercapai
SMP/MTs	8	7	87,50% / Cukup Tercapai
SMA/MA	13	10	76,92% / Kurang Tercapai
SMK	8	7	87,50% / Cukup Tercapai
Rasio Guru/Murid Perkelas			
SD/MI	2	2	100,00% / Tercapai
SMP/MTs	3	3	100,00% / Tercapai
SMA/MA	5	3	60,00% / Kurang Tercapai
SMK	3	2	66,67% / Kurang Tercapai
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	71,18	83,37	117,13% / Tercapai
% Angka Pendidikan yang ditamatkan			
Tidak/Belum Tamat SD/MI	9,2	17,59	191,20% / Tercapai
SD/MI	22,47	21,36	95,06% / Tercapai
SMP/MTs	17,77	14,52	81,71% / Cukup Tercapai
SMA/MA	23,27	21,28	91,45% / Tercapai
SMK	15,68	8,46	53,95% / Tidak Tercapai
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
SD/MI	120,38	115,78	96,18% / Tercapai
SMP/MTs	98,4	106,12	107,84% / Tercapai
SMA/MA/SMK	85,85	108,87	126,81% / Tercapai
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD/MI	105,42	101,71	96,48% / Tercapai
SMP/MTs	79,19	74,38	93,93% / Tercapai

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
SMA/MA/SMK	62,8	73,87	117,62% / Tercapai
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
SD/MI	96,51	77,45	80,25% / Cukup Tercapai
SMP/MTs	96,87	41,37	42,70% / Tidak Tercapai
SMA/MA/SMK	73,24	29,21	39,88% / Tidak Tercapai
Angka rata-rata lama sekolah			
SD/MI	6	6,12	102,00% / Tercapai
SMP/MTs	3	3,03	101,00% / Tercapai
SMA/MA/SMK	3	3	100,00% / Tercapai
Pendidikan Usia Dini	50,53	89,62	177,36% / Tercapai
Rasio Ketersediaan Sekolah			
SD/MI	25	41,94	167,76% / Tercapai
SMP/MTs	18	30,07	167,06% / Tercapai
SMA/MA/SMK	6	22,67	377,83% / Tercapai
Angka Melek Huruf	100	126,87	126,87% / Tercapai

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2011

Tabel 4.18
Capaian mutu pendidikan Kota Malang tahun 2012

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Guru/Murid			
SD/MI	6	5,45	90,83% / Tercapai
SMP/MTs	8	7,71	96,38% / Tercapai
SMA/MA	14	9,45	67,50% / Kurang Tercapai
SMK	8	7,22	90,25% / Tercapai
Rasio Guru/Murid Perkelas			
SD/MI	2	1,61	80,63% / Cukup Tercapai
SMP/MTs	3	2,23	74,29% / Kurang Tercapai
SMA/MA	5	2,66	53,28% / Tidak Tercapai
SMK	3	2,35	78,31% / Kurang Tercapai
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	73,11	85,99	117,62% / Tercapai
% Angka Pendidikan yang ditamatkan			
Tidak/Belum Tamat SD/MI	8,11	27,42	338,15% / Tercapai
SD/MI	22,67	19,46	85,84% / Cukup Tercapai
SMP/MTs	17,5	15,74	89,94% / Cukup Tercapai
SMA/MA	22,89	19,27	84,20% / Cukup Tercapai
SMK	16,93	7,72	45,61% / Tidak Tercapai
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
SD/MI	121,13	115,58	95,42% / Tercapai
SMP/MTs	98,96	104,78	105,88% / Tercapai
SMA/MA/SMK	85,5	112,64	131,74% / Tercapai
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD/MI	106,22	115,35	108,60% / Tercapai
SMP/MTs	81,03	109,28	134,86% / Tercapai
SMA/MA/SMK	63,19	88,80	140,53% / Tercapai
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
SD/MI	97,25	86,61	89,06% / Cukup Tercapai
SMP/MTs	87,44	42,19	48,25% / Tidak Tercapai

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
SMA/MA/SMK	77,62	42,47	54,72% / Tidak Tercapai
Angka rata-rata lama sekolah			
SD/MI	6	6,1	101,67% / Tercapai
SMP/MTs	3	3,01	100,33% / Tercapai
SMA/MA/SMK	3	2,99	99,67% / Tercapai
Pendidikan Usia Dini	50,53	69,78	138,10% / Tercapai
Rasio Ketersediaan Sekolah			
SD/MI	25	37,49	149,96% / Tercapai
SMP/MTs	18	30,57	169,83% / Tercapai
SMA/MA/SMK	6	28,03	467,17% / Tercapai
Angka Melek Huruf	100	97,37	97,37% / Tercapai

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2012

Kemudian untuk memperkuat data dan analisis penulis juga menggunakan Data Capaian IKU dan IKK Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2011 dan 2012 sebagai pembandingan dari hasil capaian kinerja yang tertulis dalam LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2012.

Tabel 4.19
Data Capaian Kinerja melalui IKU dan IKK tahun 2011 dan 2012

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ KUNCI	FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
			2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1	Rasio guru/murid SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK	Jumlah guru SD tiap 100 murid SD Jumlah guru SMP tiap 100 murid SMP Jumlah guru SMA tiap 100 murid SMA Jumlah guru SMK tiap 100 murid SMK	6 8 14 8	5 7 10 7	5,44 7,50 9,26 7,18
2	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK	Rata-rata jumlah guru SD per kelas Rata-rata jumlah guru SMP per kelas Rata-rata jumlah guru SMA per kelas Rata-rata jumlah guru SMK per kelas	2 3 5 3	2 3 3 2	1,61 2,24 2,57 2,34

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ KUNCI	FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
			2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV(per jenjang pendidikan)	Jumlah guru (PNS) berijazah kualifikasi S1/DIV Jumlah guru (PNS) SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA	73.11 %	83 %	84,15
4	Persentase angka pendidikan yang ditamatkan Tidak/Belum tamat SD/MI SD/MI SMP/MTs dan sederajat SMA/MA SMK	<u>Penduduk usia 10 th ke atas tamat (<SD,SD,SMP,SMA,SMK,)>x 100%</u> Jumlah penduduk	8,11 % 22,67 % 17,50 % 22,89 % 16,93 %	17,59 % 21,36 % 14,52 % 21,28 % 8,46 %	27,42 19,46 15,74 19,27 7,72
5	Angka partisipasi kasar APK SD/MI APK SMP/MTs/SMPT APK SMA/SMK/MA	<u>Banyaknya murid SD,SMP,SMA,SMK x 100%</u> Banyaknya penduduk usia 7-12,13-15, 16-18 th	121.13 % 98.96 % 85.50 %	115,78 % 106,12 % 108,87 %	115,42 % 104,67 % 111,62 %
6	Angka partisipasi murni APM SD/MI APM SMP/MTs/SMPT APM SMA/SMK/MA	<u>Banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 16-18 x 100%</u> Banyaknya penduduk usia 7-12,13-15, 16-18 th	106.22 % 81.03 % 63.19 %	101,71 % 74,38 % 73,87 %	115,35 % 109,28 % 88,80 %
7	Angka partisipasi sekolah APS SD/MI APS SMP/MTs APS SMA/SMK/MA	<u>Jumlah murid usia tertentu disemua jenjang pendidikan</u> Jumlah penduduk usia tertentu	97.25 % 87.44 % 77.62 %	77,45 % 41,37 % 29,21 %	86,61 42,19 42,47
8	Angka rata2 lama sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	6 3 3	6.1 3.1 3.1	6.10 3.01 2.99
9	Pendidikan usia dini (PAUD)	Jumlah siswa pada jenjang <u>TK/RA/TPA/KB</u> Jumlah anak usia 4-6 tahun		89,62 %	69,78 %
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (perjenjang pendidikan) SD/MI SMP/MTs	Jumlah SD/MI (tiap 10.000 penduduk usia SD/MI) Jumlah SMP/MTs (tiap 10.000 penduduk usia SMP/MTs) Jumlah SMA/MA/SMK (tiap 10.000 penduduk usia SMA/MA/SMK)	25 18	41,94 30,07	37,49 30,57

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ KUNCI	FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
			2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6
	SMA/MA/SMK		6	22,67	28,03
11	Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 th ke atas}}$	100	95,87	97,37
12	Angka putus sekolah (APS) APS SD/MI APS SMP/MTs APS SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat dan jenjang sekolah} \times 100\%}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang sekolah pd th ajaran sebelumnya}}$	0 % 0 % 0 %	0,09 0,23 0,67	0,06 0,22 0,66
13	Angka kelulusan (AL) sekolah AL SD/MI AL SMP/MTs AL SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang sekolah} \times 100\%}{\text{Jumlah siswa tk tertinggi pd jenjang sekolah pd th ajaran sebelumnya}}$	100 % 100 % 100 %	93,01 98,87 96,28	99,21 99,63 99,09
14	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tk I pada jenjang SMP/MTs} \times 100\%}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI th ajaran sebelumnya}}$	100 %	102,17	104,57%
15	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMPT/Mts	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tk I pada jenjang SMA/SMK/MA} \times 100\%}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/sajaran sebelumnya}}$	100 %	152,85	141,42%

Sumber: Data Capaian IKU dan IKK tahun 2011 dan 2012

Dari tabel yang berisi data diatas, maka penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Rasio guru/murid (jumlah guru per 100 murid)

Pada jenjang SD/MI dapat dilihat realisasi di tahun 2011 adalah 5 guru per 100 murid dan target pada tahun 2012 adalah sebesar 6 guru per murid. Kemudian pencapaian pada tahun 2012 adalah 5,45 guru per 100 murid. Maka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,45 guru per 100 murid.

Pada jenjang SMP/MTs dapat dilihat realisasi di tahun 2011 adalah 7 guru per 100 murid dan target pada tahun 2012 adalah sebesar 8 guru per murid. Kemudian pencapaian pada tahun 2012 adalah 7,50 guru per 100 murid. Maka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,50 guru per 100 murid.

Pada jenjang SMA/MA dapat dilihat realisasi di tahun 2011 adalah 10 guru per 100 murid dan target pada tahun 2012 adalah sebesar 14 guru per murid. Kemudian pencapaian pada tahun 2012 adalah 9,26 guru per 100 murid. Maka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,74 guru per 100 murid.

Pada jenjang SMK dapat dilihat realisasi di tahun 2011 adalah 7 guru per 100 murid dan target pada tahun 2012 adalah sebesar 8 guru per murid. Kemudian pencapaian pada tahun 2012 adalah 7,18 guru per 100 murid. Maka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,18 guru per 100 murid. Kesimpulannya untuk rasio guru per murid dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah menurun.

2. Rasio guru/murid per kelas rata-rata (rata-rata jumlah guru per kelas)

Pada jenjang SD/MI dapat dilihat realisasi pada tahun 2011 sebesar 2 guru per kelas dan target pada tahun 2012 sebesar 2 guru per kelas. Kemudian pencapaian pada tahun 2012 adalah 1,61 guru per kelas. Maka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,39 guru per kelas.

Pada jenjang SD/MI dapat dilihat realisasi pada tahun 2011 sebesar 3 guru per kelas dan target pada tahun 2012 sebesar 3 guru per

kelas. Kemudian pencapaian pada tahun 2012 adalah 2,24 guru per kelas. Maka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,76 guru per kelas.

Pada jenjang SD/MI dapat dilihat realisasi pada tahun 2011 sebesar 3 guru per kelas dan target pada tahun 2012 sebesar 5 guru per kelas. Kemudian pencapaian pada tahun 2012 adalah 2,57 guru per kelas. Maka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,43 guru per kelas.

Pada jenjang SD/MI dapat dilihat realisasi pada tahun 2011 sebesar 2 guru per kelas dan target pada tahun 2012 sebesar 3 guru per kelas. Kemudian pencapaian pada tahun 2012 adalah 2,34 guru per kelas. Maka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,34 guru per kelas.

Kesimpulannya untuk rasio guru per murid per kelas rata-rata dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah menurun.

3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

Pada tahun 2011 realisasi guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV mencapai 83% dan target guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada tahun 2012 sebesar 73,11%. Kemudian pencapaian jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada tahun 2012 adalah 84,15%. Maka ini menunjukkan peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV yaitu sebesar 1,15%. Kesimpulannya untuk rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah meningkat.

4. Presentase angka pendidikan yang ditamatkan

Pada tahun 2011 angka penduduk yang tidak/belum tamat SD/MI mencapai 17,59% dan target penduduk yang tamat SD/MI pada tahun 2012 adalah sebesar 8,11%. Kemudian pencapaian penduduk yang tidak/belum tamat SD/MI pada tahun 2012 adalah 27,42%. Maka ini menunjukkan penurunan mutu pendidikan karena presentase penduduk yang tidak tamat SD/MI meningkat sampai 9,83%.

Pada tahun 2011 angka penduduk yang tamat SD/MI mencapai 21,36% dan target penduduk yang tamat SD/MI pada tahun 2012 adalah sebesar 22,67%. Kemudian pencapaian penduduk yang tamat SD/MI pada tahun 2012 adalah 19,46%. Maka ini menunjukkan penurunan mutu pendidikan karena presentase penduduk yang tamat SD/MI menurun sampai 1,9%.

Pada tahun 2011 angka penduduk yang tamat SMP/MTs dan sederajat mencapai 14,52% dan target penduduk yang tamat SMP/MTs dan sederajat pada tahun 2012 adalah sebesar 17,50%. Kemudian pencapaian penduduk yang tamat SMP/MTs dan sederajat pada tahun 2012 adalah 15,74%. Maka ini menunjukkan peningkatan mutu pendidikan karena presentase penduduk yang tamat SMP/MTs dan sederajat meningkat sampai 1,22%.

Pada tahun 2011 angka penduduk yang tamat SMA/MA mencapai 21,28% dan target penduduk yang tamat SMA/MA pada

tahun 2012 adalah sebesar 22,89%. Kemudian pencapaian penduduk yang tamat SMA/MA pada tahun 2012 adalah 19,27%. Maka ini menunjukkan penurunan mutu pendidikan karena presentase penduduk yang tamat SMA/MA menurun sampai 2,01%.

Pada tahun 2011 angka penduduk yang tamat SMK mencapai 8,46% dan target penduduk yang tamat SMK pada tahun 2012 adalah sebesar 16,93%. Kemudian pencapaian penduduk yang tamat SMK pada tahun 2012 adalah 7,72%. Maka ini menunjukkan penurunan mutu pendidikan karena presentase penduduk yang tamat SMK menurun sampai 0,74%. Kesimpulannya untuk presentase angka pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah menurun.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada tahun 2011 angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MI adalah sebesar 115,78% dan target angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MI adalah 121,13%. Kemudian pencapaian angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MI pada tahun 2012 adalah 115,42%. Maka ini menunjukkan penurunan angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MI sebesar 0,36%.

Pada tahun 2011 angka partisipasi kasar pada jenjang SMP/MTs/SMPT adalah sebesar 106,12% dan target angka partisipasi kasar pada jenjang SMP/MTs/SMPT adalah 98,96%. Kemudian pencapaian angka partisipasi kasar pada jenjang SMP/MTs/SMPT

pada tahun 2012 adalah 104,67%. Maka ini menunjukkan penurunan angka partisipasi kasar pada jenjang SMP/MTs/SMPT sebesar 1,45%.

Pada tahun 2011 angka partisipasi kasar pada jenjang SMA/SMK/MA adalah sebesar 108,87% dan target angka partisipasi kasar pada jenjang SMA/SMK/MA adalah 85,50%. Kemudian pencapaian angka partisipasi kasar pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2012 adalah 111,62%. Maka ini menunjukkan penurunan angka partisipasi kasar pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 2,75%. Kesimpulannya untuk angka partisipasi kasar dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah menurun.

6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Pada tahun 2011 angka partisipasi murni pada jenjang SD/MI adalah sebesar 101,71% dan target angka partisipasi murni pada jenjang SD/MI adalah 106,22%. Kemudian pencapaian angka partisipasi murni pada jenjang SD/MI pada tahun 2012 adalah 115,35%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka partisipasi murni pada jenjang SD/MI sebesar 13,64%.

Pada tahun 2011 angka partisipasi murni pada jenjang SMP/MTs/SMPT adalah sebesar 74,38% dan target angka partisipasi murni pada jenjang SMP/MTs/SMPT adalah 81,03%. Kemudian pencapaian angka partisipasi murni pada jenjang SMP/MTs/SMPT pada tahun 2012 adalah 109,28%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka partisipasi murni pada jenjang SMP/MTs/SMPT sebesar 34,9%.

Pada tahun 2011 angka partisipasi murni pada jenjang SMA/SMK/MA adalah sebesar 73,87% dan target angka partisipasi murni pada jenjang SMA/SMK/MA adalah 63,19%. Kemudian pencapaian angka partisipasi murni pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2012 adalah 88,80%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka partisipasi murni pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 14,93%. Kesimpulannya untuk angka partisipasi murni dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah meningkat

7. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pada tahun 2011 angka partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI adalah sebesar 77,45% dan target angka partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI adalah 97,25%. Kemudian pencapaian angka partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI pada tahun 2012 adalah 86,61%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI sebesar 9,16%.

Pada tahun 2011 angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah sebesar 41,37% dan target angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah 87,44%. Kemudian pencapaian angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 adalah 42,19%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,82%.

Pada tahun 2011 angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA adalah sebesar 29,21% dan target angka partisipasi

sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA adalah 77,62%. Kemudian pencapaian angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2012 adalah 42,47%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 13,26%. Kesimpulannya untuk angka partisipasi sekolah dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah meningkat.

8. Angka rata-rata lama sekolah

Pada tahun 2011 angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SD/MI adalah sebesar 6,1 dan target angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SD/MI adalah 6. Kemudian pencapaian angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SD/MI pada tahun 2012 adalah 6,10. Maka ini menunjukkan angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SD/MI dari tahun 2011 ke tahun 2012 prosentase nya tetap.

Pada tahun 2011 angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah sebesar 3,1 dan target angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah 3. Kemudian pencapaian angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 adalah 3,01. Maka ini menunjukkan angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SMP/MTs menurun 0,9.

Pada tahun 2011 angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA adalah sebesar 3,1 dan target angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA adalah 3. Kemudian pencapaian angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun

2012 adalah 2,99. Maka ini menunjukkan angka rata-rata lama sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA menurun 0,11. Kesimpulannya untuk angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah menurun.

9. Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Pada tahun 2011 realisasi pendidikan usia dini mencapai 89,62% dan pencapaian pendidikan usia dini pada tahun 2012 adalah 69,78%. Maka ini menunjukkan penurunan pendidikan usia dini dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 19,84%. Kesimpulannya untuk pendidikan usia dini dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah menurun.

10. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (perjenjang pendidikan)

Pada tahun 2011 jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SD/MI adalah sebesar 41,94 dan target jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SD/MI adalah 25. Kemudian pencapaian jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SD/MI pada tahun 2012 adalah 37,49. Maka ini menunjukkan jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SD/MI menurun 4,45.

Pada tahun 2011 jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SMP/MTs adalah sebesar 30,07 dan target jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SMP/MTs adalah 18. Kemudian pencapaian jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 adalah 30,57. Maka ini menunjukkan

jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SMP/MTs meningkat 0,50.

Pada tahun 2011 jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SMA/MA/SMK adalah sebesar 22,67 dan target jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SMA/MA/SMK adalah 6. Kemudian pencapaian jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2012 adalah 28,03. Maka ini menunjukkan jumlah sekolah tiap 10.000 penduduk pada jenjang SMA/MA/SMK meningkat 5,36. Kesimpulannya untuk angka ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah meningkat.

11. Angka melek huruf

Pada tahun 2011 realisasi angka melek huruf mencapai 95,87% dan target angka melek huruf pada tahun 2012 adalah 100%. Kemudian pencapaian angka realisasi melek huruf pada tahun 2012 mencapai 97,37%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka melek huruf sebesar 1,5%. Kesimpulannya untuk angka melek huruf dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah meningkat.

12. Angka Putus Sekolah (APS)

Pada tahun 2011 angka putus sekolah pada jenjang SD/MI adalah sebesar 0,09% dan target angka putus sekolah pada jenjang SD/MI adalah 0%. Kemudian pencapaian angka putus sekolah pada jenjang SD/MI pada tahun 2012 adalah 0,06%. Maka ini menunjukkan

peningkatan mutu pendidikan karena angka putus sekolah pada jenjang SD/MI menurun sebesar 0,03%.

Pada tahun 2011 angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah sebesar 0,23% dan target angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah 0%. Kemudian pencapaian angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 adalah 0,22%. Maka ini menunjukkan peningkatan mutu pendidikan karena angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs menurun sebesar 0,01%.

Pada tahun 2011 angka putus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK adalah sebesar 0,67% dan target angka putus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK adalah 0%. Kemudian pencapaian angka putus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2012 adalah 0,66%. Maka ini menunjukkan peningkatan mutu pendidikan karena angka putus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK menurun sebesar 0,01%. Kesimpulannya untuk angka putus dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah menurun.

13. Angka Kelulusan Sekolah

Pada tahun 2011 angka lulus sekolah pada jenjang SD/MI adalah sebesar 93,01% dan target angka lulus sekolah pada jenjang SD/MI adalah 100%. Kemudian pencapaian angka lulus sekolah pada jenjang SD/MI pada tahun 2012 adalah 99,21%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka lulus sekolah pada jenjang SD/MI sebesar 6,2%.

Pada tahun 2011 angka lulus sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah sebesar 98,87% dan target angka lulus sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah 100%. Kemudian pencapaian angka lulus sekolah pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 adalah 99,63%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka lulus sekolah pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,76%.

Pada tahun 2011 angka lulus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK adalah sebesar 96,28% dan target angka lulus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK adalah 100%. Kemudian pencapaian angka lulus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2012 adalah 99,09%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka lulus sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 2,81%. Kesimpulannya untuk angka kelulusan dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah meningkat.

14. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

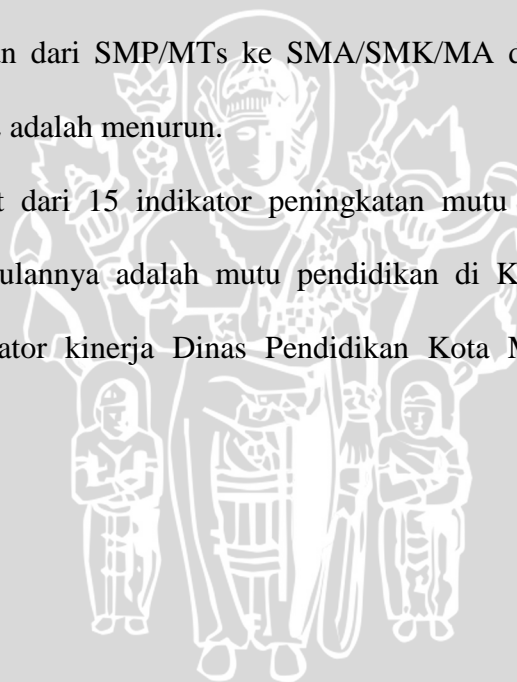
Pada tahun 2011 angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs adalah sebesar 102,17% dan target angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs adalah 100%. Kemudian pencapaian angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2012 adalah 104,57%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 2,4%. Kesimpulannya untuk angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah meningkat.

15. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Pada tahun 2011 angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah sebesar 152,85% dan target angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah 100%.

Kemudian pencapaian angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2012 adalah 141,42%. Maka ini menunjukkan peningkatan angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 11,43%. Kesimpulannya untuk angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah menurun.

Dilihat dari 15 indikator peningkatan mutu pendidikan diatas, maka kesimpulannya adalah mutu pendidikan di Kota Malang sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Malang mengalami peningkatan.



C. Analisis Data

1. Kebijakan, program dan anggaran yang dilaksanakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Mahsun (2012) bahwa kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi tersebut. Artinya kinerja sektor publik ini meliputi kinerja individu, kelompok dan organisasi. Ketiganya saling berkaitan karena dengan adanya kerjasama yang baik antar individu dan kelompok maka akan membangun kinerja organisasi yang baik pula.

Dalam prakteknya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Zubaidah selaku sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang adalah melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program serta alokasi dana yang berasal dari APBD Kota Malang. Pada Dinas Pendidikan Kota Malang ini pelaksanaan kebijakan dituangkan program-program dan didukung oleh alokasi anggaran yang benar. Dinas Pendidikan menyusun kebijakan berdasarkan Undang-Undang dari Pemerintah Kota Malang tentang pendidikan di Kota Malang. Dari kebijakan yang disusun kemudian Dinas Pendidikan Kota Malang menyusun program kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang.

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Malang antara lain memberikan beasiswa S1 untuk tenaga pendidik dan kependidikan, mengadakan workshop untuk melatih keterampilan guru dan pelaksanaan kegiatan KKG dan MGMP. Yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk program-program peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan dan program tersebut disusun dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang. Kebijakan dan program tersebut harus dilaksanakan dan dibutuhkan kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dengan sekolah yang ada di Kota Malang.

A. Kebijakan

Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Malang antara lain:

1. Memberikan beasiswa kepada pegawai dan guru untuk melanjutkan sekolah S1

Organisasi sektor publik menurut Sondang P. Siagian dalam Sukidin (2009: 196) didefinisikan sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan, organisasi sektor publik ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sesuai dengan teori tersebut Dinas Pendidikan Kota Malang

merupakan organisasi formal yang mendapatkan mandat untuk mengelola pendidikan yang ada di Kota Malang.

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014 bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan lebih ditekankan atau difokuskan pada peningkatan tenaga pendidik. Maka kebijakan untuk memberikan beasiswa kepada pegawai dan guru untuk melanjutkan sekolah sampai ke jenjang S1 atau D IV merupakan salah satu upayanya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas siswa didik melalui tenaga pendidiknya. Sesuai yang didefinisikan dalam RENSTRA bahwa Dinas Pendidikan Kota Malang berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya terlebih dahulu untuk tujuan meningkatkan pula kualitas pendidikan siswa.

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Zubaidah selaku sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang bahwa dalam mencapai mutu pendidikan yang lebih baik di Kota Malang maka harus dimulai dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya. Dalam prakteknya Dinas Pendidikan benar-benar melaksanakan kebijakan tersebut. Dapat kita ketahui dari data yang diperoleh melalui LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 bahwa pada setiap tahunnya jumlah guru yang berkualifikasi S1 terus meningkat. Capaian ini menunjukkan Dinas Pendidikan Kota Malang berhasil

dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi minimal S1 atau D IV melalui beasiswa yang diberikan untuk tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan sekolah S1.

Sampai saat ini kebijakan tersebut berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hal yang menjadi masalah, antara lain yaitu untuk guru memiliki waktu yang terbatas untuk melaksanakan kuliah setiap minggunya karena mereka juga harus mengajar di sekolah setiap hari. Selain itu masih terdapat guru yang belum bisa lulus tepat pada waktunya, sehingga mereka wajib melanjutkan kuliah dengan biaya mereka sendiri bukan lagi dari APBD Kota Malang. Akan tetapi hal ini tidak menjadikan penghambat bagi Dinas Pendidikan Kota Malang karena mereka tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur dan terbukti tenaga pendidik yang mengikuti program ini dapat mencapai hasil sesuai dengan yang telah ditentukan.

Peningkatan kualitas guru dan pegawai melalui kebijakan beasiswa S1 dan S2 tersebut dinilai akan meningkatkan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Trisnawati bahwa pada umumnya guru dan pegawai yang telah mendapatkan beasiswa tersebut wajib untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang.

2. Mengadakan berbagai Workshop untuk melatih keterampilan guru

Kebijakan di dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014 salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan yang dapat menunjang profesionalisme, penguasaan teknologi dan kualifikasi tenaga aparatur. Maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang adalah memfasilitasi dan mendukung kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik. Diantaranya Dinas Pendidikan mengadakan berbagai workshop untuk melatih keterampilan guru dalam mengajar. workshop yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang tidak hanya ditujukan pada guru saja, akan tetapi juga tenaga pendidik yang lain yaitu tenaga yang membantu dalam sekolah dan juga pegawai yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang.

Kegistsn workshop yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang diwajibkan untuk diikuti oleh guru dan pegawai Dinas yang diundang. Sesuai dengan data hasil wawancara bahwa jenis workshop yang diadakan meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012. Pada tahun 2011 ada 3 workshop yang dilaksanakan dan peserta yang hadir berjumlah 240 guru, sedangkan pada tahun 2012 ada 7 workshop yang diadakan dan peserta yang hadir berjumlah 1.220 guru. Data tersebut

menunjukkan peningkatan antusiasme guru dalam mengikuti workshop yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang.

Akan tetapi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan workshop, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Penanggungan yaitu masih adanya hambatan antara lain workshop belum bisa menjangkau semua guru dalam sekali diadakan workshop, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghambat yang cukup serius untuk melaksanakan workshop, solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang adalah dengan mengadakan workshop secara bertahap.

Maka kesimpulannya adalah Dinas Pendidikan Kota Malang mampu melaksanakan kebijakan seperti yang tertulis dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014 dalam mengupayakan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik yang salah satunya melalui workshop. Sesuai dengan data yang diperoleh maka workshop yang diadakan dapat dilaksanakan dan mendapat dukungan yang positif dari peserta workshop. Maka dapat disimpulkan bahwa workshop tersebut terlaksana dengan baik dan mengalami peningkatan.

3. KKG dan MGMP

Kebijakan di dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014 salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan yang dapat menunjang profesionalisme, penguasaan

teknologi dan kualifikasi tenaga aparatur. Dalam mencapai kebijakan tersebut selain adanya workshop juga dibentuk KKG dan MGMP. KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) ini bertujuan untuk pengembangan rencana pembelajaran. KKG ini ditujukan untuk guru sekolah dasar yaitu TK (Taman Kanak-Kanak) dan SD (Sekolah Dasar) sedangkan MGMP ditujukan untuk guru sekolah menengah yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan mengenai bagaimana perencanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, penguasaan materi oleh guru, keterampilan guru dalam menggunakan sumber daya atau sarana belajar yang ada, pengelolaan kelas oleh guru kemudian bagaimana penilaian dan penggunaan buku referensi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

Dari penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa KKG dan MGMP tersebut lebih mengamati detail kegiatan pada proses belajar mengajar di kelas. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan ini ditujukan hanya untuk guru yang memegang peran penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Bagaimana guru harus bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan hasil wawancara dimana Dinas Pendidikan Kota Malang menyampaikan bahwa kebijakan ini terlaksana dengan baik, begitu juga yang disampaikan oleh bapak Sudyono selaku Kepala Sekolah SDN Penanggungungan bahwa mereka yang terbentuk dalam kelompok kerja menanggapi positif dan mendukung adanya kegiatan ini. Kesimpulannya bahwa kebijakan KKG dan MGMP berdampak positif dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga perlu dipertahankan oleh DinAS Pendidikan Kota Malang.

B. Program

Dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014 kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan tersebut diantaranya terdiri atas:

1. Menuntaskan program sertifikasi bagi tenaga pendidik
2. Memfasilitasi kegiatan yang dapat menunjang profesionalisme, penguasaan teknologi dan kualifikasi tenaga aparatur

Sesuai dengan kebijakan menurut RENSTRA diatas Dinas Pendidikan Kota Malang melaksanakan beberapa program antara lain:

- a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik
- b. Seleksi Calon Kepala Sekolah
- c. Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

- d. Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
- e. Peningkatan Kualifikasi dari S1 Ke S2 Bagi Tenaga Pendidik
- f. Rapat Kerja Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK
- g. Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif
- h. Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba

Program-program diatas benar-benar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang secara terjadwal. Program-program diatas menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014 diatas. Program-program yang dibuat berfokus pada pengembangan tenaga pendidik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik melalui sertifikasi, lomba dan rapat kerja guru.

Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan prinsip Dinas Pendidikan Kota Malang seperti yang disampaikan oleh Ibu Zubaidah bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang bergantung pada peningkatan tenaga pendidiknya. Jika tenaga pendidik sudah baik maka siswa didiknya juga akan memiliki kualitas yang baik pula. Hal ini menjadikan Dinas Pendidikan Kota Malang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidiknya.

Program-program telah disusun dan dijadwalkan dengan baik untuk dilaksanakan. Hasil dari adanya program-program tersebut cukup baik karena program dapat dilaksanakan dengan lancar. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga dapat dirasakan langsung oleh pihak sekolah yang menjalankan program tersebut, salah satunya adalah sekolah.

Dari hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah SDN Penanggungan yang menyampaikan bahwa mereka yang menjalankan program dari Dinas Pendidikan Kota Malang merasa sangat terbantu dengan adanya banyak program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang, selain bantuan dari segi finansial juga ada bantuan secara moril yaitu pihak Dinas bersungguh-sungguh untuk membantu mensukseskan program yang dibuat. Disamping itu pihak sekolah pun sangat antusias untuk mengikuti program-program dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Tercapainya program tersebut adalah jika terjalin kerjasama yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Dengan begitu program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang telah berhasil dilaksanakan seluruhnya karena kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah yang berkaitan.

C. Anggaran

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian ke

empat pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Zubidah selaku sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang menyebutkan bahwa anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang berasal dari APBD Kota Malang sebesar 10% untuk pendidikan di Kota Malang. Dimana dari 10% tersebut dialokasikan lagi yang 60% untuk pendidikan yang bersifat fisik yaitu untuk pembangunan dan pemeliharaan sekolah sedangkan yang 40% untuk pendidikan yang sifatnya non fisik yaitu kegiatan program-program yang disusun. Kemudian untuk beberapa kegiatan workshop dan pelatihan tidak hanya mendapatkan dana dari APBD akan tetapi juga mendapatkan bantuan dana dari lembaga lain misalnya LPMD (Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan) yang ada di Surabaya memberikan bantuan dana untuk kegiatan workshop yang diadakan di Kota Malang.

Alokasi dana yang diperoleh Dinas Pendidikan Kota Malang untuk pendidikan di Kota Malang dianggarkan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang dibuat. Pada setiap tahunnya jika anggaran masih tersisa maka akan digunakan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Kesimpulannya adalah Dinas Pendidikan memanfaatkan

dana yang diperoleh dari APBD untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam peningkatan pendidikan di Kota Malang dengan baik. Karena jika ada sisa dana pada satu periode maka dana tersebut akan digunakan dan dianggarkan untuk kegiatan pada tahun berikutnya.

2. Kinerja Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Malang

Menurut Mahsun (2012: 26-28) terdapat empat elemen pokok pengukuran kinerja, antara lain menetapkan tujuan, merumuskan indikator kinerja, mengukur kinerja dan evaluasi kinerja. Sesuai dengan teori tersebut penulis telah menulis sesuai dengan elemen pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan organisasi

Dalam menetapkan tujuan organisasi penulis menyesuaikan dengan fokus dalam judul penelitian yaitu melihat kinerja Dinas Pendidikan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang.

2. Merumuskan indikator pengukuran kinerja

Indikator pengukuran kinerja ini sesuai dengan RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Malang yaitu dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang difokuskan berdasarkan pada peningkatan mutu tenaga pendidikanya.

3. Mengukur ketercapaian tujuan kinerja

Dalam mengukur ketercapaian tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dituangkan dalam analisis data dapat dilihat dari beberapa poin antara lain:

- a. Rasio guru per 100 murid
- b. Rasio guru per 100 murid per kelas rata-rata
- c. Guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D IV
- d. Presentase angka pendidikan yang ditamatkan
- e. Angka partisipasi kasar
- f. Angka partisipasi murni
- g. Angka partisipasi sekolah
- h. Angka rata-rata lama sekolah
- i. Pendidikan usia dini (PAUD)
- j. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (perjenjang pendidikan)
- k. Angka melek huruf
- l. Angka putus sekolah
- m. Angka kelulusan (AL) sekolah
- n. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
- o. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

4. Evaluasi kinerja

Dalam evaluasi kinerja penulis memberikan simpulan dan pendapat dalam kesimpulan dan saran, dimana hasil yang disimpulkan tersebut berdasarkan analisis data.

Dalam analisis data ini sudah sampai pada tahap mengukur tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Yang mana sesuai dengan RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2009-2014 disampaikan bahwa indikator kinerja dari peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang dapat dilihat melalui 3 indikator, antara lain

1. Rasio guru per 100 murid
2. Rasio guru/murid per kelas rata-rata
3. Jumlah guru yang yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (per jenjang pendidikan)
4. Presentase angka pendidikan yang ditamatkan
5. Angka partisipasi kasar
6. Angka partisipasi murni
7. Angka partisipasi sekolah
8. Angka rata-rata lama sekolah
9. Pendidikan usia dini (PAUD)
10. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (perjenjang pendidikan)
11. Angka melek huruf
12. Anga putus sekolah

13. Angka kelulusan (AL) sekolah
14. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
15. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Maka disini penulis menganalisis data yang diperoleh melalui perbandingan antara LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik) dan hasil capaian kinerja melalui IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2011 dan tahun 2012 mengenai angka ketercapaian dari beberapa indikator diatas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Malang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan pengumpulan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten. Diharapkan dari pengumpulan data kinerja tersebut mampu mengambil keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi, dan efektifitas.

Sesuai dalam LAKIP Dinas Pendidikan Kota Malang pengukuran kinerja mencakup: (1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi

pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Dalam perhitungan prosentase rencana tingkat capaian dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Maka untuk mengukur hasil kinerja Dinas Pendidikan Kota Malang dapat dilihat dari hasil pencapaian mutunya dengan membandingkannya dari tahun 2011 dan 2012. Disini yang diamati oleh penulis adalah ketercapaian kinerja pada tahun 2011 dan tahun 2012. Untuk mengukur pencapaian target diatas sesuai dengan Renstra, LAKIP dan IKU Dinas Pendidikan Kota Malang telah ditentukan standar penilaiannya.

Dari hasil penyajian data maka penulis dapat memberikan analisis untuk ketercapaian peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang yang dilihat dari beberapa indikator diatas. Indikator kinerja yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah pada indikator rasio guru/murid, guru yang memenuhi kualifikasi S1/DV, angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (per jenjang pendidikan), angka melek huruf, angka putus sekolah,

angka kelulusan dan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Kemudian indikator kinerja yang mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah pada indikator rasio guru/murid per kelas rata-rata, presentase angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi kasar, angka rata-rata lama sekolah, pendidikan usia dini dan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK.

Maka kesimpulannya adalah dari 15 indikator kinerja dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang 9 indikator mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan 6 indikator mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Artinya kinerja Dinas Pendidikan Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

